

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk masa 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam rencana strategis digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyiapkan rencana strategis yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Rencana strategis berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka 5 (lima) tahun.

Dalam pelaksanaannya rencana strategis harus dijabarkan kembali ke dalam dokumen rencana kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders* yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj).

Pembenahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan esensinya adalah untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek diantaranya kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya aparatur yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong dalam

rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan yang berkualitas.

Sebagai Perangkat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan melaksanakan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Diharapkan ketiga urusan pemerintahan ini dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis yang juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mendukung tercapainya visi-misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

I.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
2. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesiatahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahn serta tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 nomor 25 Tambahan Lembaran Negara nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 114);
9. Undang-Undang Nomer 28 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
14. Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Persandian.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- a) Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 2018-2023 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
- b) Sebagai kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.
- c) Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

1.3.2 Tujuan

- a) Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b) Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
- c) Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan secara terukur.
- d) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

5.2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMINFO KABUPATEN BANGKALAN

Upaya mewujudkan birokrasi yang professional dan berintegritas tinggi merupakan upaya strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya adalah :

1. Layanan informasi publik;
2. Layanan komunikasi publik dan pengaduan masyarakat;
3. Layanan komunikasi intra pemerintah daerah;
4. Layanan *data center* dan *disaster recovery center*;
5. Layanan penggunaan *domain* dan *sub domain* pemerintah;
6. Layanan keamanan informasi;
7. Layanan data statistik sektoral;

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

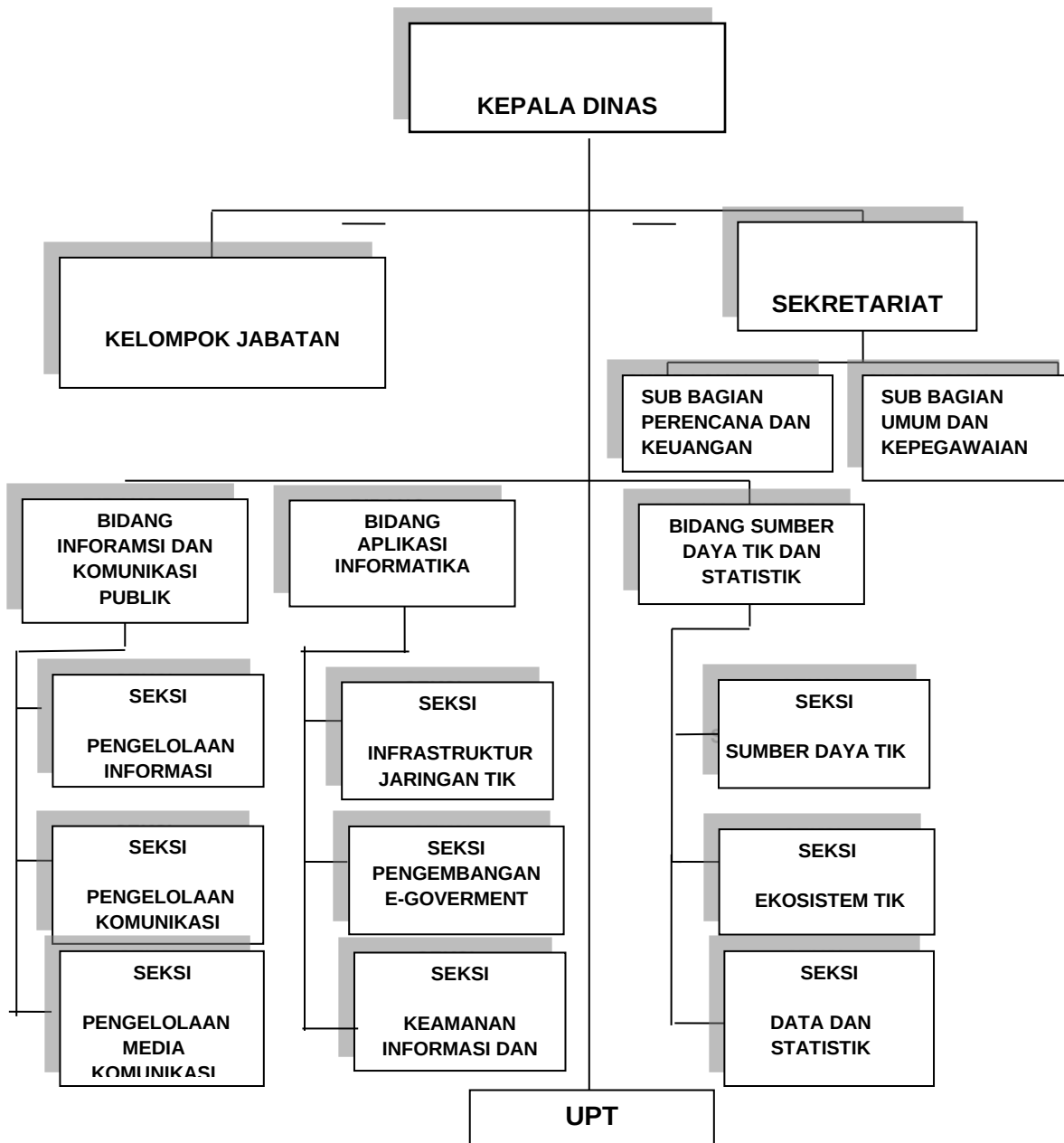
Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian ;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi dan informatika bidang statistik dan bidang persandian ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang komunikasi dan informatika , bidang statistik dan bidang persandian ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas, Komunikasi dan Informatika Kab.Bangkalan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan amanah yang diemban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang komunikasi dan informatika ;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi ;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana ;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan ;
- f. Pengelolaan barang milik daerah ; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan program perencanaan bidang komunikasi dan informatika serta melakukan evaluasi dan pelaporan serta melakukan kegiatan tata usaha keuangan.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan tata usaha umum dan tata usaha kepegawaian.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Kegiatan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang informasi dan komunikasi publik ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;

- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Membawahi Seksi :

- 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- 2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- 3. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

1.1 Seksi Pengelolaan Informasi Publik;

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi pengelolaan Informasi Publik, melaksanakan opini dan aspirasi publik, menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media massa dan media social, mengumpulkan pendapat umum, mengelola pengaduan masyarakat, mengelola kesekretariatan Komisi Informasi, melaksanakan DPA dan DPPA, menyusun dan melaksanakan standard pelayanan dan Standard Operasional Prosedure (SOP) serta melaksanakan Pengendalian Intern (SPI).

2.1 Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;

Mempunyai tugas menyusun Rencana dan anggaran di seksinya, menyelenggarakan Pemantauan tema komunikasi Publik lintas sektoral lingkup Nasional dan pemerintah Daerah, mengolah dan menganalisis data informasi di lingkup nasional dan daerah serta lintas sektoral lingkup nasional dan daerah, mengelola pelayanan informasi public, melaksanakan layanan pengaduan masyarakat di tingkat Kabupaten, melaksanakan DPA dan DPPA, Menyusun SP Dan SOP, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

3.1 Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

Mempunyai tugas menyusun rencana dan anggaran di seksinya, menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, melaksanakan pembuatan konten lokal, mengelola saluran komunikasi milik pemda/media internal, melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah, melaksanakan DPA dan DPPA, menyusun SP dan SOP dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

3. Bidang Aplikasi Informatika (Aptika)

Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang layanan Infrastruktur dasar, data center, disaster recovery center dan TIK Pemerintah Kabupaten, layanan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifikasi dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan system komunikasi intra pemerintah kabupaten. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang aplikasi informatika;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan dibidang aplikasi informasi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang aplikasi informatika;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan aplikasi informatika;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang layanan bidang infrastruktur aplikasi informatika .

Bidang Aplikasi Informatika Membawahi Seksi :

1. Seksi Infrastruktur Jaringan TIK
 2. Seksi Pengembangan E- Government
 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
- 1.1 Seksi Infrastruktur Jaringan TIK;

Mempunyai Tugas Menyusun Rencana Kegiatan dan anggaran seksi Infrastruktur Jaringan TIK, Menyelenggarakan Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center, Melaksanakan Inovasi TIK dan Implementasi E-Government, Meningkatkan SDM dalam Pengelolaan Infrastruktur dan TIK, Filtering Konten Negatif, Pengelolaan Internet Pemerintah, Melaksanakan Layanan Interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah, Melaksanakan DPA dan DPPA, melaksanakan SOP Dan SPI.

2.1 Seksi Pengembangan E-Government;

Mempunyai Tugas menyusun Rencana kegiatan dan anggaran seksinya, Menyelenggarakan Pengembangan aplikasi Pemerintah dan Pelayanan Publik yang terintegrasi, Memelihara Aplikasi Kepemerintahan dan Layanan Publik, Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pemanfaatan Sistem Informasi,

melaksanakan layanan interkoneksi dan interoperabilitas, sebagai layanan Pusat Application Program Interface (API). Melaksanakan DPA dan DPPA, Melaksanakan Standard Pelayanan Minimal dan SOP, serta mengadakan SPI.

3.1 Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;

Mempunyai Tugas menyusun Rencana Kegiatan dan anggaran sesuai Seksinya, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah, menyelenggarakan layanan Monitoring Trafik elektronik, Layanan Penanganan insenden keamanan informasi, melaksanakan audit TIK, melaksanakan layanan sister persandian, menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis tentang tata kelola Persandian, melaksanakan DPA dan DPPA, melaksanakan standard Pelayanan Minimal dan SOP, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

4. Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik Daerah (SD TIK).

Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah kabupaten dan Masyarakat, Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public, penyelenggaraan *goverment chief information officer* (GCIO) pemerintah kabupaten, penyelenggaraan ekosistem TIK smart city di kabupaten, pengolahan data elektronik dan statistik sebagai bahan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara makro;

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik mempunyai fungsi

- a. Pelaksanaan Penyusunan Program kerja bidang Sumber daya, TIK, data dan statistik;

- b. Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan dibidang Sumber Daya, TIK,data dan Statistik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Sumber daya,TIK, data dan Statistik;
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di Bidang Sumber daya TIK, Data dan statistik.
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di Bidang Sumber Daya TIK, Data dan Statistik.
- f. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang penguatan kapasitas Sumber Daya TIK, Data dan Statistik.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik Membawahi Seksi :

- 1. Seksi Sumber Daya TIK
- 2. Seksi Ekosistem TIK
- 3. Seksi Data dan statistik

1.1 Seksi Sumber daya TIK;

Mempunyai tugas menyusun dan merencanakan kegiatan dan anggaran seksinya, menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, Pengembangan sumber daya Komunikasi, Melaksanakan Layanan Domain dan Sub Domain Pemerintah Kabupaten, Peningkatan Kapasitas aparatur dalam Pengelolaan domain, Portal dan website, Peningkatan Kapasitas aparatur dalam bidang TIK, Peningkatan masyarakat dalam implementasi *e-government* dan *smart city*, melaksanakan DPA dan DPPA, melaksanakan Standard Pelayanan Minimal dan SOP, melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.

2.1 Seksi Ekosistem TIK;

Mempunyai tugas menyusun Rencana kegiatan dan anggaran seksi ekosistem TIK, menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government kabupaten, Layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, layanan Pengembangan Bussines proses reeginering pelayanan dilingkungan pemerintah dan Non Pemerintah, melaksanakan layanan sistem informasi smart city, melaksanakan DPA dan DPPA, melaksakan SP dan SOP, serta melaksanakan SPI.

3.1 Seksi Data dan Statistik;

Mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi data dan statistik, melaksanakan penetapan standard format data dan informasi , Penetapan standard format statistik dan kebijakan, melaksanakan layanan recovery data dan informasi, melasanakan Pengelolaan data elektronik, Peningkatan kapasitas aparatur dalam Pengelolaan Data dan Statistik, melaksanakan DPA dan DPPA, Melaksanakan SP dan SOP, melakukan Sistem Pengedalian Intern (SPI).

2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya antara lain; sumber daya aparatur (SDM), sumber daya TIK, serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya-sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan sebanyak 110 orang. Dari sejumlah tersebut masih belum memenuhi

kualifikasi teknis bidang komunikasi dan informatika. Susunan kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan, kualifikasi teknis pegawai dan jumlah pegawai yang tersebar di bidang bidang:

Tabel 2.1
Susunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-3	1
2	S-2	6
3	S-1	26
4	D-III	1
5	SLTA/SMU	19
6	SLTP	2
	JUMLAH	55

Sumber : Diskominfo Tahun 2018

Tabel 2.2
Susunan Tenaga Harian Lepas (THL)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S-2	
2	S-1	11
3	D-III	
4	D-II	
5	D-I	
6	SLTA	43
7	SLTP	1
	JUMLAH	55 Orang

Sumber : Diskominfo Tahun 2018

Tabel 2.3
Susunan Pegawai di Unit Pelayanan

No	Unit Kerja	PNS	THL	Jumlah
1	Radio SBFM	2	3	
2	Komisi Informasi	3		
3.	Desk PPID	2	2	
4.	Website PPID	2		
	Jumlah	9	5	

Sumber : Diskominfo Tahun 2018

Tabel 2.4
Data Kualifikasi Teknis Pegawai

NO	Kualifikasi	Yang ada	Jumlah ideal	Kurang
1.	S-1 Informatika	2	30	28
2.	S-1 Komunikasi/Broadcast	-	20	20
3.	S-1 Elektro	1	10	9
	JUMLAH	3	60	57

Sumber : Diskominfo Tahun 2018

2.2.2 Aset/Modal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tidak hanya mengandalkan jumlah dan kualitas SDM Aparatur. Pelaksanaan tugas dan fungsi juga menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi. Sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan informasi dan komunikasi, informasi telematika, serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan.

Sarana dan prasarana kerja Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan diantaranya :

1. Server dengan kapasitas 6 tera (setara 6000 Gb);
2. Bandwidth 100 MBps;
3. Menara NOC Jaringan intra pemda .
4. Radio Suara Bangkalan FM 92,1 MHz;
5. Desk PPID Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
6. Billboard/Media Luar Ruang;
7. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

8. Kelompok Pertunjukan Rakyat;
9. Tabloid Lensa Madura;
10. Media Online www.bangkalankab.go.id.
11. Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan membantu Bupati dalam pengelolaan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Dalam kurun waktu 2013-2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan yaitu :

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Secara umum target dan realisasi pencapaian kinerja pelayanan dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bangkalan dalam Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No.	Indicator kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Renstra (%/Th)					Realisasi Capaian (%/Th)					Rasio Capaian (%/Th)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional, melalui :																		
	Jumlah Media Massa : majalah, radio dan televisi.			12 x Tahun	-	-	-	12	12	-	-	-	14	14	-	-	-	116	116
	Media Baru: website (Media Online)			Setiap Hari	-	-	-	Setiap hari	Setiap hari	-	-	-	Setiap hari	Setiap hari	-	-	-	100	100
	Media tradisional: pertunjukan rakyat			12 x Tahun	-	-	-	5	5	-	-	-	5	5	-	-	-	100	100
	Media interpersonal: sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya			12 x Tahun Tiap Kec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Media luar seperti media buletin,leafflet, bookled, brosur, spanduk dan baliho			12 x Tahun	-	-	-	12	12	-	-	-	12	23	-	-	-	100	192
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100

2.3.2 Realisasi Anggaran

Secara umum anggaran belanja daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2017 telah ditetapkan berdasarkan Perda APBD yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>	1.526.686.590	2.284.546.050	2.541.405.150	1.433.340.150	3.244.586.650	1.082.517.960	2.181.798.928	2.052.408.245	1.294.764.256	2.939.176.971	71	96	81	90	91	429.475.015	464.089.574
1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informatika	55.743.500					54.699.385											
2. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	68.691.900					68.691.900											
3. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	47.579.000					47.579.000											
4. Pengadaan Website	35.437.250					33.937.000											
5. Operasional Website	716.366.440					685.895.575											
6. Forum Diskusi atau Dialog Interaktif	69.000.000					69.000.000											
7. Penyusunan Profil Komisi Informasi	4.448.500					4.446.000											
8. Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi	8.294.500					7.100.000											
<i>Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</i>																	

1. Pengumpulan Bahan & Pengelolaan Data Dibidang Pos & Telekomunikasi	75.000.000					74.337.100											
<i>Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</i>																	
1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	37.175.000					36.832.900											
<i>Program Kerjasama informasi dan media massa</i>																	
1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	188.650.000					185.659.300											
2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	50.000.000					49.955.100											
<i>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</i>																	
1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	170.300.500					169.300.500											
		2.284.546.050					2.181.798.928										
<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>																	
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi		48.276.500					48.264.500										
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi		55.214.250					54.198.500										
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		47.579.000					45.186.100										
Operasional Website		828.384.100					822.301.550										
Forum Diskusi atau Dialog Interaktif		63.630.000					60.650.000										

Penyusunan Profil Komisi Informasi		4.448.500					4.409.500										
Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi		8.294.500					7.623.500										
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi		80.370.000					77.321.583										
Operasional Komisi Informasi		490.699.200					426.679.667										
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi		269.000.000					264.252.688										
<i>Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</i>																	
Kegiatan Pengumpulan Bahan & Pengelolaan Data Dibidang Pos & Telekomunikasi		100.000.000					89.353.000										
<i>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</i>																	
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan Informasi		50.000.000					48.715.100										
<i>Program kerjasama informasi dan media massa</i>																	
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah		188.650.000					183.823.200										
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat		50.000.000					49.020.040										
			2.541.405.150					2.052.408.245									
<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>																	
Pengadaan alat studio dan komunikasi			49.084.000					43.400.000									
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi			44.764.250					24.926.150									
Operasional Website			1.000.000.000					862.395.000									

Forum Diskusi atau Dialog Interaktif			48.937.500				45.236.500										
Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi			3.544.500				3.390.100										
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi			76.928.500				72.351.884										
<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>																	
Operasional Komisi Informasi			509.859.200				306.310.011										
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi			131.350.000				129.939.600										
Pembentukan Komisi Informasi			261.197.200				177.572.200										
<i>Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi</i>																	
Pengumpulan Bahan & Pengelolaan Data Dibidang Pos & Telekomunikasi			119.950.000				106.679.600										
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi			51.940.000				45.416.000										
<i>Program kerjasama informasi dan media massa</i>																	
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			197.000.000				195.016.100										
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat			46.850.000				39.775.100										
				1.433.340.150				1.294.764.256									
<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>																	
Pengadaan alat studio dan komunikasi				159.736.800				145.652.000									
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi				44.764.250				40.524.250									
Operasional Website				118.707.900				117.729.550									

Forum Diskusi atau Dialog Interaktif				49.477.500					40.395.000								
Penyusunan Profil Komisi Informasi				5.099.300					5.099.300								
Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi				3.544.500					3.518.100								
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi				160.188.500					141.428.600								
Operasional Komisi Informasi				465.377.600					419.179.419								
<i>Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi</i>																	
Pengumpulan Bahan & Pengelolaan Data Dibidang Pos & Telekomunikasi				87.524.400					64.576.400								
<i>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</i>																	
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi				50.242.400					41.469.337								
<i>Program kerjasama informasi dan media massa</i>																	
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah				206.177.000					198.081.500								
Penyebar Luasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat				82.500.000					77.110.800								
					3.244.586.650					2.939.176.971							
<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>																	
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor					34.842.204					34.842.204							
<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>																	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya																	

<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>																	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD					2.150.000					2.150.000							
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					1.000.000					762.000							
<i>Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja</i>																	
Penunjang operasional OPD					1.303.385.496					1.059.445.748							
Fasilitasi peringatan hari jadi bangkalan					15.000.000					12.847.726							
Fasilitasi peringatan hari kebangkitan nasional					40.354.700					40.004.700							
Penyusunan Renstra OPD					1.250.000					950.000							
Penyusunan dan evaluasi Renja OPD					2.500.000					2.500.000							
<i>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</i>																	
1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi					20.000.000					19.700.000							
<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</i>																	
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi					14.514.250					14.364.250							
Operasional Website					176.000.000					166.802.600							
Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi					100.188.500					85.176.352							
Operasional Komisi Informasi					381.424.950					368.175.966							

<u>Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi</u>																	
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi					98.789.300					93.231.225							
<u>Program kerjasama informasi dan media massa</u>																	
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah					186.430.250					172.635.000							
Penyebar Luasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat					82.500.000					81.382.200							
<u>Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi</u>																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi					728.000.000					727.950.000							
<u>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</u>																	
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah					56.257.000					56.257.000							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan.

2.4.1 Tantangan

Tantangan (*treaths*) bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini akan dijabarkan tantangan pengembangan pelayanan urusan komunikasi dan informatika sebagai berikut :

- a. Ditetapkannya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau indeks *e-government* menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD 2018-2023 yang telah ditentukan targetnya menuntut kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan untuk bisa memenuhi. Sementara infrastruktur jaringan komunikasi intra pemerintah yang ada belum mampu mengintegrasikan seluruh satuan kerja dengan Data Center yang dikelola Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan sebagai syarat utama penerapan SPBE.
- b. Pesatnya kemampuan hacker dalam meretas situs-situs pemerintah memaksa Tim IT Dinas Kominfo untuk selalu melakukan *upgrade* keamanan informasi secara berkala dan teratur.
- c. Ketersediaan SDM aparatur yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi dan informatika menjadi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi karena selalu bergantung pada pihak eksternal.
- d. Untuk ketersediaan data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan program Satu Data Provinsi dalam *East Java Smart Province* dan Satu Data Indonesia (SDI) belum terbangun sinergitas antara semua perangkat daerah.

2.4.2 Peluang

Peluang menguntungkan berdasarkan hasil analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pelayanan urusan komunikasi dan informatika diantaranya adalah :

- a. Tersedianya berbagai regulasi baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi tentang penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia membuka kesempatan peran yang lebih luas dan dominan dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagaimana tujuan yang dituangkan dalam RPJMD.
- c. Kebijakan keterbukaan informasi publik mendorong peran serta masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Terbukanya peluang replikasi atau aplikasi berbagi pakai di berbagai daerah mempermudah melakukan inovasi layanan administrasi maupun layanan publik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMINFO KABUPATEN BANGKALAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika adalah terjadinya kesenjangan antara hasil kinerja yang dicapai dengan yang direncanakan dan yang ingin dicapai pada masa datang. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, berikut hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan bidang kominfo yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan ini dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, seperti pada table berikut :

Table 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan informasi belum memenuhi harapan masyarakat.	1. Belum terciptanya budaya birokrasi yang melayani. 2. Kompetensi ASN dalam pengelolaan informasi masih rendah. 3. Terbatasnya infrastruktur media komunikasi dan informasi.	1. <i>Mindsite</i> ASN sebagai pelayan masyarakat belum terbentuk. 2. Pengembangan kompetensi belum optimal. 3. Rendahnya kemampuan anggaran.
2	Kinerja sebagai <i>regulator</i> dan <i>integrator</i> TIK dalam penerapan SPBE untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi belum optimal.	1. Rendahnya pengetahuan ASN tentang pentingnya peran TIK dalam pemerintahan. 2. Belum terpenuhinya infrastruktur dasar TIK sebagai syarat penerapan SPBE.	1. Belum dilakukan program pelatihan <i>softskill</i> terkait <i>transformasi leadership</i>. 2. Dukungan terhadap ketersediaan infrastruktur TIK masih rendah.

3	Peran sebagai penyedia data atau wali data sektoral belum terwujud	Kesenjangan data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan	1. Perubahan alur penyedia data disebabkan otonomi. 2. Ego Sektoral.
---	--	--	---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2018-2023

Visi Pembangunan Bupati Bangkalan dan Wakil Bupati Bangkalan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGKALAN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA BERBASIS POTENSI LOKAL. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mewujudkan kehidupan keagamaan.
2. Menyelenggarakan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi.
3. Meningkatkan tata kelola potensi ekonomi, sosial dan budaya untuk meningkatkan daya saing daerah.
4. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
5. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan dalam mendorong iklim investasi.

Untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan sesuai tugas dan fungsinya berkewajiban untuk mensukseskan misi ke-2 yaitu MENYELENGGARAKAN BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS TINGGI. Untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi maka perlu dilakukan perubahan tata kelola dalam proses bisnis serta diperlukan SDM aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Dalam konteks tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, perubahan tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya dapat dilakukan melalui perubahan proses kerja konvensional ke berbasis elektronik. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat yang terus mendorong seluruh K/L/D untuk melaksanakan amanat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Konsekuensi dari pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan elektronik menuntut kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informatika. Selain itu diperlukan investasi infrastruktur TIK. Melalui dukungan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informatika maka diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, akuntabel, berdaya saing, serta mendorong peningkatan pelayanan. Dengan demikian maka misi ke-2 akan lebih mudah tercapai.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur.

Telaahan terhadap renstra K/L dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

3.3.1 Nawacita.

Dalam visi misi dan program aksi Presiden dan wakil Presiden Jokowi-JK Tahun 2014-2019 telah dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut dengan Nawacita, dimana salah satu dari kesembilan agenda Nawacita tersebut berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bangkalan, khususnya dalam Nawacita ke-2, yaitu MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi penentuan isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah bagian penting dari perwujudan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. Sedangkan penerapan SPBE dan peran sebagai wali data sektoral yang handal akan menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

3.3.2 Renstra Kementerian Kominfo RI.

Dalam kurun waktu Tahun 2014-2019 rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah mencanangkan beberapa agenda, yaitu :

- A. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
- B. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, social, budaya, pertahanan dan keamanan.
- C1 Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
- C2 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

3.3.3 Renstra Dinas Kominfo Propinsi Jawa Timur.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dalam periode Tahun 2014-2019 telah menetapkan rencana strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika .
- 3) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta pelayanan publik.
- 4) Meningkatnya layanan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Kesesuaian antara tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan dengan Nawacita, Renstra Kementerian Kominfo RI dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur terletak pada tugas dan fungsi mewujudkan tata kelola pemerintahan agar berjalan demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

3.4 Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah tetapi sangat signifikan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bergulirnya Revolusi Industry 4.0. telah merubah tatanan dunia termasuk Indonesia. Dampaknya terjadi semangat dan inisiatif untuk merubah birokrasi pemerintah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Melalui TIK beberapa daerah kabupaten/kota di Indonesia terbukti mampu menyajikan proses administrasi lebih efektif dan efisien serta mampu menyajikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Trend pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*), Kabupaten Cerdas (*Smart District*), Desa Cerdas (*Smart Village*) bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencanangkan Provinsi Cerdas dengan program *East Java Smart Province* adalah wujud dari kreatifitas dan inovasi yang bertujuan memberikan kenyamanan dan layanan prima kepada masyarakat dengan bantuan TIK.

Diantara teknologi masa depan yang dapat mempengaruhi perkembangan pemanfaatan TIK di pemerintahan diantaranya :

- 1) *Mobile Internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, maka layanan pemerintah harus dapat diakses oleh masyarakat pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
- 2) *Cloud Computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
- 3) *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, actuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan

pemerintah diharapkan bersifat adaptif dan responsive terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh masyarakat pengguna.

4) *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, tidak berpola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan teknologi ini diharapkan mampu memberikan dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

5) *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan *AI* berpotensi membantu pemerintah mengurangi beban administrasi seperti mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan tulisan/suara, dan membuat draf dokumen.

Selain itu dampak kemajuan teknologi informasi telah memunculkan kesadaran warga negara terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintah merespon dengan kebijakan bahwa setiap K/L/D wajib menyajikan informasi yang menjadi ranah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara internal birokrasi pemerintah telah bertransformasi dalam beberapa proses bisnis, seperti proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara elektronik, perijinan online, pengaduan online, dan beberapa proses bisnis lainnya telah dilakukan secara online. Hal ini diperkuat dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui SPBE pemerintah berharap pada akhir tahun 2025 ada keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan keterpaduan maka akan menciptakan proses

bisnis pemerintahan yang terintegrasi sehingga akan terbentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur dasar TIK, mendorong terciptanya ekosistem TIK, serta bersama-sama dengan Bagian Organisasi membangun tata kelola SPBE.

Khusus yang bersentuhan dengan RT/RW terkait tugas tambahan sebagai Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai konsekuensi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan telah memberlakukan sistem informasi *cellplan* sebagai alat kendali dan pengawasan. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet yang masih berbasis nirkabel dibutuhkan ruang untuk pembangunan tower monopole. Pada waktu mendatang perlu ditingkatkan dengan penggunaan *fiber optik* yang juga memerlukan pemanfaatan RT/RW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu strategis menjadi bagian yang mutlak dalam suatu proses perencanaan. Kemampuan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat akan membuat perencanaan yang disusun menjadi tepat sasaran, efektif, diterima oleh pihak terkait serta dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis pada permasalahan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati, telaahan Renstra Kementerian/lembaga maka dapat disusun isu-isu strategis Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, sebagai berikut :

3.5.1 Isu-Isu Bidang Sumber Daya Manusia

- a. SDM aparatur yang ada belum memiliki kepemimpinan (*leadership commitment*) yang memadai untuk melaksanakan SPBE. Belum bersungguh-sungguh meninggalkan kepemimpinan ego sektoral serta belum bersinergi agar bersama-sama memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara SPBE memerlukan keterpaduan dan keterhubungan antar semua perangkat daerah untuk membangun satu kesatuan pemerintahan yang utuh. Akibatnya SPBE belum dapat diterapkan dan dimanfaatkan secara optimal.
- b. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam menerapkan SPBE antara lain di bidang perencanaan, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, keamanan dan keandalan informasi, pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsive.
- c. SDM aparatur belum memiliki kompetensi teknis untuk pengelolaan dan penyediaan konten informasi bahan diseminasi seperti di bidang multi media, desain grafis, jurnalistik, serta dasar-dasar ilmu komunikasi lainnya.

3.5.2 Isu-Isu Bidang Suprastruktur dan Infrastruktur

- a) Regulasi dan peraturan-perundangan yang ada terkait pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum ditindaklanjuti dengan pedoman-pedoman teknis seperti standar operasional prosedur (SOP). Dalam proses bisnis SPBE berbagai macam layanan terhadap pengguna perlu diatur dengan SOP untuk memperjelas proses pelayanan.
- b) Kelembagaan TIK yang sudah terbentuk belum sepenuhnya dipahami maksud dan tujuannya, akibatnya kelembagaan yang sedianya untuk

mempertegas otoritas dan disposisi tidak berjalan. Hal ini sebagai akibat kurangnya sosialisasi.

- c) *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* belum memenuhi kapasitas maksimal untuk menjamin peran selaku integrator bagi keberlangsungan pelayanan pengguna SPBE baik intra pemerintah maupun masyarakat.
- d) Media informasi yang tersedia belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat Kabupaten Bangkalan sehingga masih terjadi kesenjangan informasi khususnya tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di tengah derasnya arus informasi yang tersaji oleh berbagai media social.
- e) Penyediaan Data Sektoral sebagai dasar analisis kebijakan atau pengambilan keputusan masih terjadi kesenjangan antara data yang tersedia dengan data yang dibutuhkan. Hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sinergitas dan kerjasama antar perangkat daerah dalam memanfaatkan sumber daya bersama.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANGKALAN

Sebagai upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan khususnya misi ke-2 yaitu *Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi*, maka dalam RPJMD Tahun 2018-2023 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan yaitu **Indeks SPBE**.

Penetapan indeks SPBE sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk instrumen evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Struktur penilaian Indeks SPBE terdiri dari 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek serta 35 (tiga puluh lima) indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Domain, Aspek, Indikator, Pembobotan SPBE

DOMAIN	ASPEK	INDIKATOR	BOBOT
Kebijakan SPBE	Kebijakan Tata Kelola Kebijakan Layanan	7	7 %
		10	10 %
Tata Kelola SPBE	Kelembagaan Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	8 %
		2	8 %
		3	12 %
Layanan SPBE	Administrasi Pemerintahan Publik	6	33 %
		7	22 %

Indikator adalah informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Sedangkan tingkat kematangan

SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1.Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan • Proses tata kelola dilakukan secara ad hoc
2.Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dg memenuhi sebagian kebutuhan di instansi pemerintah • Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yg telah didefinisikan dan didokumentasikan
3.Terstandarisasi	• Pengaturan telah ditetapkan dg memenuhi semua kebutuhan instansi pemerintah • Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dg standarisasi
4.Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dg memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah • Proses tata kelola dilaksanakan dg pengukuran kinerja secara kuantitatif
5.Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal • Proses tata kelola dilaksanakan dg peningkatan kualitas secara berkesinambungan

Tabel 4.3
Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1.Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah
2.Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3.Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4.Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dan layanan SPBE lain
5.Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 sebagaimana Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN								SASARAN								STRATEGI	
No	Uraian	Indikator	Target tahun					No	Uraian	Indikator	Target Tahunan					Kebijakan	Program / Kegiatan
			2019	2020	2021	2022	2023				2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan melalui pelayanan komunikasi dan informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,3 C	2,6 B	2,9 B	3,2 B	3,5 BS	1	Tersedianya infrastruktur jaringan TIK untuk akses intra Pemerintah Daerah	Persentase layanan akses internet, intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Daerah	30	40	50	60	70	Pengembangan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwidth	Program penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik
								2	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah	Persentase konten informasi yang dipaparkan kepada masyarakat	40	60	80	90	100	Pengembangan berbagai jalur media informasi	Program pengembangan komunikasi dan informasi publik
								3	Tersedianya statistik daerah	Jumlah jenis data statistik daerah yang tersedia	2	4	4	6	6	Peningkatan kualitas data statistik daerah	Program pengembangan sumber daya TIK dan statistik daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan. Dalam mengembangkan tugas dan kewenangannya, Dinas Komunikasi dan Informatika harus memiliki pedoman/acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh masyarakat.

Strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Penetapan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal mengetahui kekuatan dan kelemahan. Dari hasil pertimbangan tersebut ditetapkan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan :

1. Meningkatkan SDM aparatur di bidang komunikasi dan informatika;
2. Mengembangkan infrastruktur TIK;
3. Memanfaatkan replikasi aplikasi untuk inovasi dan pelayanan;
4. Meningkatkan literasi aparatur dan masyarakat tentang pemanfaatan TIK;

5. Pengorganisasian potensi sumber daya TIK baik internal maupun eksternal.

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, antara lain :

1. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Mengembangkan infrastruktur TIK;
3. Meningkatkan tata kelola dengan menyediakan standard operasional prosedur (SOP) dalam setiap kegiatan;
4. Meningkatkan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan urusan komunikasi dan informatika;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya informasi dan komunikasi.

Berikut adalah tabel keselarasan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

VISI	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal		
MISI	Ke-2 Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi		
Tujuan RPJMD	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan		
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bangkalan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas	Tersedianya infrastruktur jaringan	Peningkatan akses internet intra pemerintah daerah.	Pengembangan infrastruktur dan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan melalui pelayanan komunikasi dan informatika	TIK untuk akses intra pemerintah daerah.		kapasitas bandwidth.
	Terselenggaranya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah.	Peningkatan kapasitas media radio, cetak, interpersonal, tradisional, online, dan media baru lainnya.	Pengembangan berbagai jalur media informasi.
	Tersedianya Statistik Daerah	Penyusunan data statistik sektoral	Peningkatan kualitas data statistik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan, dan pendanaan indikatif dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan kaitannya dengan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Bangkalan periode Tahun 2018-2023, maka program dan kegiatan yang direncanakan adalah :

6.1 Program Pelayanan Kesekretariatan

- a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa
- b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
- c. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah
- d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- f. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai
- g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
- h. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD
- i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
- j. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
- k. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten

6.2 Program Penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik

- a. Kegiatan Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Jaringan TIK .
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik dan Informasi Layanan Publik.
- c. Kegiatan Pengelolaan keamananan Informasi dan Persandian.

6.3 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

- a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik
- b. Kegiatan Fasilitas Hari-Hari Besar Nasional
- c. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi Publik
- d. Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Komisi Informasi
- e. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi

6.4 Program Pengembangan Sumber daya TIK dan Statistik Daerah

- a. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK
- b. Kegiatan Pengembangan Ekosistem TIK
- c. Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Statistik Sektor

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Usulan Program dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2018)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
					Kinerja Program		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					(outcome) dan Kegiatan (output)		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja pemerintah daerah		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)				1,99 (Cukup)														
	Tersedianya Infrastruktur jaringan TIK dilingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan	Prosentase terintegrasiny a sub domain dengan domain resmi pemerintah																		
			2.10.20	Program penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Prosentase terintegrasinya sub domain dengan domain resmi pemerintah	30	30	1,212,547,200	40	1,460,000,000	50	1,694,052,800	60	1,911,605,600	70	2,065,915,440	70	8,344,121,040	Diskominfo Bkin	
			2.10.20.01	pengembangan, pengawasan dan pengendalian infrastruktur jaringan TIK	jumlah website resmi yang dikelola	1 website/PD	2 website/PD	141,750,000	2 website/PD	175,000,000	2 website/PD	208,250,000	2 website/PD	225,000,000	2 website/PD	241,750,000	2 website/PD	991,750,000	Diskominfo Bkin	
					jumlah jaringan yang terpasang	1 paket	1 paket	886,350,000	1 paket	1,000,000,000	1 paket	1,113,650,000	1 paket	1,227,300,000	1 paket	1,340,950,000	1 paket	5,568,250,000	Diskominfo Bkin	
					jumlah menara telekomunikasi yang diawasi dan dikendalikan	90 menara telekomunikasi	100 menara telekomunikasi	36,600,000	280 menara telekomunikasi	75,000,000	285 menara telekomunikasi	100,000,000	290 menara telekomunikasi	125,000,000	295 menara telekomunikasi	135,000,000	300 menara telekomunikasi	471,600,000	Diskominfo Bkin	

			2.10.20.02	pembinaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan informasi layanan publik	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang tersedia	1 aplikasi	1 aplikasi	97,737,100	5 aplikasi	125,000,000	10 aplikasi	152,262,900	15 aplikasi	179,525,800	20 aplikasi	192,715,440	25 aplikasi	747,241,240	Diskominfo Bkln	
			2.10.20.03	pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Jumlah SDM bidang keamanan informasi	61 orang	1 kegiatan	32,477,600	1 kegiatan	50,000,000	1 kegiatan	67,522,400	1 kegiatan	85,044,800	1 kegiatan	85,500,000	1 kegiatan	320,544,800	Diskominfo Bkln	
					Jumlah operasional pengelolaan keamanan informasi	-	1 kali	17,632,500	1 kali	35,000,000	1 kali	52,367,500	1 kali	69,735,000	1 kali	70,000,000	1 kali	244,735,000	Diskominfo Bkln	
	Terselenggara nya penyebarnya n informasi penyelenggara an pemerintahan	jumlah konten informasi yang dipublikasikan																		
			2.10.21	Program pengembangan informasi dan komunikasi publik	jumlah konten informasi yang diizinkan melalui jaringan radio	30	40	1,954,386,000	60	2,262,740,000	80	2,386,190,000	90	2,531,240,000	100	2,948,740,000	100	12,083,296,000	Diskominfo Bkln	
			2.10.21.01	pengelolaan informasi publik	jumlah permohonan data dan informasi yang ditindak lanjuti	12 permohonan	12 permohonan	45,302,500	12 permohonan	76,870,000	12 permohonan	86,870,000	12 permohonan	96,870,000	12 permohonan	96,870,000	12 permohonan	402,782,500	Diskominfo Bkln	
					jumlah pembinaan KIM	0	0	-	1 kegiatan	100,000,000	1 kegiatan	115,000,000	2 kegiatan	127,500,000	2 kegiatan	150,000,000	2 kegiatan	492,500,000	Diskominfo Bkln	
					terpilihnya komisioner komisi informasi masa bakti 2019-2023	5 orang	5 orang	239,950,000	0	-	0	-	0	-	5 orang	350,000,000	10 orang	589,950,000	Diskominfo Bkln	
					jumlah issue yang berhasil diangkat	12 issue	12 issue	21,506,000	12 issue	76,870,000	12 issue	86,870,000	12 issue	96,870,000	12 issue	96,870,000	12 issue	378,986,000	Diskominfo Bkln	
			2.10.21.02	fasilitasi hari-hari besar nasional	jumlah momentum peringatan hari besar nasional yang tersaji kepada masyarakat	2 kegiatan	3 kegiatan	163,600,000	3 kegiatan	200,000,000	3 kegiatan	200,000,000	3 kegiatan	215,000,000	3 kegiatan	215,000,000	3 kegiatan	993,600,000	Diskominfo Bkln	
			2.10.21.03	pengelolaan komunikasi publik	jumlah pameran yang diikuti	1 pameran	1 pameran	54,775,000		0		0		0	0	-	0	54,775,000	Diskominfo Bkln	
					jumlah pertunjukan rakyat yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	48,762,500	5 kali	75,000,000	8 kali	100,000,000	11 kali	100,000,000	14 kali	125,000,000	43 kali	448,762,500	Diskominfo Bkln	

					jumlah wartawan yang diundang untuk sinkronisasi	40 orang	60orang	648,090,000	60orang	700,000,000	60orang	715,000,000	60orang	725,000,000	60orang	725,000,000	60orang	3,513,090,000	Diskominfo Bkln	
					jumlah media luar ruang yang dikembangkan dan dipelihara	3 media luar ruang	3 media luar ruang	15,000,000	7 media luar ruang	50,000,000	10 media luar ruang	75,000,000	12 media luar ruang	100,000,000	14 media luar ruang	100,000,000	46 media luar ruang	340,000,000	Diskominfo Bkln	
			2.10.21.04	pengelolaan dan operasional komisi informai	operasional komisi informasi	12 bulan	12 bulan	437,010,000	12 bulan	500,000,000	12 bulan	500,000,000	12 bulan	525,000,000	12 bulan	525,000,000	12 bulan	2,487,010,000	Diskominfo Bkln	
			2.10.21.05	pengelolaan media komunikasi	jumlah siaran kelling, penyebaran brosur disebarkan	12 kali	12 kali	7,150,000	14 kali	25,000,000	16 kali	30,000,000	18 kali	35,000,000	20 kali	40,000,000	22 kali	137,150,000	Diskominfo Bkln	
					jumlah kebijakan yang diinformasikan pada masyarakat	5 kegiatan	5 kegiatan	40,550,000	10 kegiatan	54,000,000	15 kegiatan	67,450,000	20 kegiatan	75,000,000	25 kegiatan	80,000,000	25 kegiatan	317,000,000	Diskominfo Bkln	
					jumlah lensa madura yang diterbitkan	6 kali	4 kali	123,590,000	12 kali	250,000,000	12 kali	250,000,000	14 kali	265,000,000	16 kali	270,000,000	16 kali	1,158,590,000	Diskominfo Bkln	
					jumlah konten informasi yang disiarkan melalui jaringan radio	500 informasi	1200 informasi	109,100,000	1200 informasi	155,000,000	1200 informasi	160,000,000	1200 informasi	170,000,000	1200 informasi	175,000,000	1200 informasi	769,100,000	Diskominfo Bkln	
	Tersedianya sistem data statistik daerah yang handal, efektif dan efisiensi	Jumlah jenis data statistik yang tersedia																		
			2.10.22	Program pengembangan sumber daya TIK dan statistik daerah	jumlah jenis data statistik yang tersedia	20	20	227,195,000	30	450,000,000	40	560,000,000	55	600,000,000	60	635,000,000	60	2,472,195,000	Diskominfo Bkln	
			2.10.22.01	pengembangan sumber daya TIK	jumlah komunitas relawan TIK	5 komunitas	50 orang	43,000,000	60 orang	75,000,000	70 orang	100,000,000	70 orang	100,000,000	70 orang	100,000,000	70 orang	418,000,000	Diskominfo Bkln	
					jumlah aparatur peserta pelatihan survey	nihil	10 orang	22,000,000	15 orang	50,000,000	15 orang	65,000,000	15 orang	75,000,000	15 orang	80,000,000	15 orang	292,000,000		
			2.10.22.02	pengembangan ekosistem TIK	jumlah operator TIK yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	nihil	61 SKPD	34,672,500	61 SKPD	75,000,000	61 SKPD	100,000,000	61 SKPD	125,000,000	61 SKPD	125,000,000	61 SKPD	459,672,500	Diskominfo Bkln	
					jumlah aparatur yang memahami tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	nihil	61 SKPD	27,522,500	61 SKPD	65,000,000	61 SKPD	70,000,000	61 SKPD	75,000,000	61 SKPD	80,000,000	61 SKPD	317,522,500	Diskominfo Bkln	
			2.10.22.03	Penyusunan dan pengelolaan data dan statistik	Dokumen meta data dan statistik sektoral daerah yang tersajikan	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	2 dokumen	185,000,000	2 dokumen	225,000,000	2 dokumen	225,000,000	2 dokumen	250,000,000	9 dokumen	985,000,000	Diskominfo Bkln	

	Terpenuhinya Pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan layanan internal kesekretariatan																	
			0.00.16	Program Pelayanan Kesekretariatan	Prosentase terpenuhinya layanan kesekretariatan	70	75	2,754,871,800	77	3,517,937,250	80	3,615,805,206	83	3,887,405,019	85	4,084,223,700	85	17,830,242,975	Diskominfo Bkin
			0.00.16.01	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan		10 jenis	411,078,700	11 jenis	529,103,750	11 jenis	541,871,706	11 jenis	587,811,519	11 jenis	631,113,700	54 jenis	2,700,979,375	Diskominfo Bkin
					Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan		79 orang	1,276,350,000	15 jenis	1,624,450,000	15 jenis	1,637,050,000	15 jenis	1,649,050,000	15 jenis	1,669,250,000	60 jenis	7,856,150,000	
			0.00.16.02	Kedinasan dalam daerah dan luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan		5 kali	5,000,000	5 kali	5,000,000	5 kali	5,000,000	5 kali	5,000,000	5 kali	5,000,000	25 kali	25,000,000	Diskominfo Bkin
					Jumlah perjalanan dinas dalam luar yang dilaksanakan		100 kali	250,697,100	100 kali	270,000,000	100 kali	270,000,000	100 kali	295,000,000	100 kali	295,000,000	500 kali	1,380,697,100	
			0.00.16.03	Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun		14 laporan	9,830,000	14 dokumen	15,000,000	14 dokumen	15,000,000	14 dokumen	20,000,000	14 dokumen	30,510,000	56 dokumen	90,340,000	Diskominfo Bkin
			0.00.16.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang dipelihara		11 jenis	109,440,000	11 jenis	139,440,000	11 jenis	159,440,000	11 jenis	189,440,000	11 jenis	229,440,000	55 jenis	827,200,000	Diskominfo Bkin
					Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara		3 unit	115,000,000	3 unit	175,000,000	3 unit	175,000,000	3 unit	200,000,000	3 unit	250,000,000	15 unit	915,000,000	
			0.00.16.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan		0	-	12 jenis	229,943,500	12 jenis	229,943,500	14 jenis	389,943,500	14 jenis	200,750,000	52 unit	1,050,580,500	Diskominfo Bkin
					Jumlah prasarana aparatur yang diadakan		10 jenis	279,943,500	2 unit	100,000,000	2 unit	100,000,000	0 unit	0	2 unit	200,000,000	6 jenis	679,943,500	
			0.00.16.06	Peningkatan disiplin pegawai	Jumlah pakaian aparatur dan kelengkapan yang diadakan		120 stel	100,000,000	120 buah	100,000,000	120 buah	100,000,000	120 buah	100,000,000	120 buah	100,000,000	480 buah	500,000,000	Diskominfo Bkin
			0.00.16.07	Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Aparatur		112 orang	95,892,500	112 orang	150,000,000	112 orang	175,000,000	112 orang	200,000,000	112 orang	200,000,000	112 orang	820,892,500	Diskominfo Bkin
			0.00.16.08	Penyusunan perencanaan dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		1 dokumen	8,555,000	3 dokumen	10,000,000	3 dokumen	12,500,000	2 dokumen	13,000,000	3 dokumen	15,000,000	12 dokumen	59,055,000	Diskominfo Bkin
					Jumlah dokumen penganggaran yang disusun		2 dokumen	11,595,000	4 dokumen	15,000,000	4 dokumen	17,500,000	4 dokumen	20,000,000	4 dokumen	22,500,000	18 dokumen	86,595,000	
					Jumlah dokumen data dan informasi		1 dokumen	25,000,000	2 data	35,000,000	2 data	37,500,000	2 data	50,000,000	2 data	55,000,000	8 data	202,500,000	
			0.00.16.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD	Jumlah laporan triwulanan & semesteran monev PD yang tersusun (APBD, Renja/RKPD)		1 dokumen	8,320,000	8 laporan	10,000,000	8 laporan	12,500,000	8 laporan	15,000,000	8 laporan	17,500,000	32 laporan	63,320,000	Diskominfo Bkin

					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun		2 dokumen	10,670,000	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	60,000,000	1 dokumen	75,660,000	1 dokumen	75,660,000	6 dokumen	271,990,000		
			0.00.16.10	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun per semester/akhir tahun		1 dokumen	7,500,000										7,500,000	Diskominfo Bkin	
					Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun mingguan/bulanan/triwulan/semester				66 laporan	1,200,000	66 laporan	2,500,000	66 laporan	3,500,000	66 laporan	3,500,000	264 laporan	10,700,000		
					Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun				1 dokumen	8,800,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	14,000,000	1 dokumen	14,000,000	4 dokumen	46,800,000		
			0.00.16.11	Fasilitasi peringatan hari jadi Kabupaten/Provinsi	Jumlah kegiatan peringatan hari jadi dan hari besar yang diikuti	1 kegiatan	1 kegiatan	30,000,000	2 kegiatan	50,000,000	2 kegiatan	55,000,000	2 kegiatan	60,000,000	2 kegiatan	70,000,000	9 kegiatan	235,000,000	Diskominfo Bkin	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah tujuan dan sasaran yang diukur berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang menggambarkan indikasi kinerja organisasi lebih baik dari sebelumnya.

Apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang memadahi, maka kondisi yang ada akan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) tentang apa saja yang berhasil diperoleh selama berkegiatan. Dengan indikator kinerja, perencanaan telah menetapkan alat ukur untuk menentukan ketercapaian tujuan dan sasaran.

Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta harus didukung pencapaiannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan, yaitu :

- Misi Kedua : Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi.
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan disamping sebagai Perangkat Daerah Penanggungjawab terpenuhinya target Indikator Sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023, juga berkewajiban memenuhi target 3 (tiga) indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu :

1. Persentase layanan komunikasi intra pemerintah daerah.

2. Persentase konten informasi yang dipaparkan pada masyarakat.

3. Jumlah jenis data statistik sektoral yang tersedia.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemda	5 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	100%
2.	Persentase konten Informasi yang dipaparkan kepada masyarakat	20 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	100%
3.	Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Tersedia	1 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Data Statistik

• Catatan :

Indikator 1 : Jumlah Satker 341 Unit, terdiri dari 34 PD, 18 Kecamatan, 10 Bagian, 8 Kelurahan, 271 Desa, 3 BUMD.

Indikator 2 : Jumlah Penduduk 850.000.000 Jiwa.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018–2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis ini juga mengacu pada pembangunan urusan komunikasi dan informatika dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2018-2023 ini menjadi pedoman bagi sekretariat, seluruh bidang, dan unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) 5 (lima) tahun yang akan datang serta menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan tahun 2019-2023, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya sehingga indicator kinerja sasaran dan indicator program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan melalui Sekretariat dan

Bidang-bidang diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan.

3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 merupakan indicator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati Bangkalan periode Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan dapat mendukung pencapaian misi kedua Bupati dan wakil Bupati Bangkalan periode 2018-2023 yaitu “Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas Tinggi”.